



DAMPAK CYBERDEMOCRACY TERHADAP PARTISIPASI PEMILIH PADA MASA KAMPANYE PILPRES 2019

Apriya Maharani Rustandi¹*

Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 12 Juni 2023
Accepted 1 Oktober 2023
Available online 10 Oktober 2023

Kata Kunci:

Partisipasi Pemilih;
Pemilihan Presiden;
cyberdemocracy

Keywords:

Voter Participation,
presidential election;
cyberdemocracy

ABSTRAK

Sebuah partisipasi pada umumnya membutuhkan usaha penyadaran untuk meningkatkan antusiasme pemilihnya. *Cyberdemocracy* yang berkembang saat ini telah memberikan wadah bagi pemilih untuk berpendapat secara berbebas melalui media. Oleh karena itu peneliti melakukan tinjauan literatur untuk menelaah dampak dari *cyberdemocracy* pada partisipasi pemilih yang dilaksanakan pada pilpres 2019. Peneliti melakukan penelaahan 23 artikel jurnal internasional dari tahun 2016 sampai tahun 2021, dan 10 artikel jurnal dari tahun 2016 sampai tahun 2021 kemudian memfokuskan diri untuk melihat dampak dari *cyberdemocracy* terhadap partisipasi pemilih. Hasil tinjauan ini menunjukkan bahwa variabel-variabel yang terkait dengan *cyberdemocracy* dapat memberikan sebuah dampak terhadap pemilih dengan sistem komunikasi multi arah di internet. Peningkatan dari partisipasi pemilih dikarenakan banyak faktor, salah satunya yakni *cyberdemocracy* yang saat ini berkembang pesat dan menjadi sarana dalam mengakses sebuah informasi calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilih dan lebih meyakinkan masyarakat saat ini. Secara keseluruhan tinjauan ini memberikan titik acuan yang tepat untuk penelitian lebih lanjut dengan mengidentifikasi partisipasi pemilih dengan hadirnya *cyberdemocracy* pada masa kampanye.

ABSTRACT

A participation generally requires awareness efforts to increase voter enthusiasm. Cyberdemocracy that is developing at this time has provided a place for voters to express their opinions freely through the media. Therefore, the researcher conducted a literature review to examine the impact of cyberdemocracy on voter participation in the 2019 presidential election. The researcher conducted a review of 23 international journal articles from 2016 to 2021, and 10 journal articles from 2016 to 2021 then focused on looking at the impact of cyberdemocracy on voter participation. The results of this review indicate that the variables related to cyberdemocracy can have an impact on voters with a multi-way communication system on the internet. The increase in voter participation is due to many factors, one of which is cyberdemocracy which is currently growing rapidly and becomes a means of accessing information on presidential and vice-presidential candidates who will be elected and is more convincing to the public today. Overall, this review provides an appropriate reference point for further research by identifying voter participation with the presence of cyberdemocracy during the campaign period.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.



1. Pendahuluan

Ekonomi, politik dan sosial budaya saat ini sangat dipengaruhi oleh kehidupan yang menuju pada satu aspek yang penting yakni media baru. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan hal ini sejalan dengan pengguna internet dari tahun ke tahun terus meningkat. Perkembangan yang sangat pesat dari pengguna internet dalam kehidupan sehari-hari mengalami lonjakan. Jayani (2019) menyatakan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia

* Corresponding author

E-mail addresses: apriyamaharani@student.upi.edu

(APJII) yang dilaksanakan bulan April 2019, jumlah pengguna internet di Indonesia sebesar 171,7 juta jiwa atau sekitar 64,8% dari total populasi penduduk Indonesia sebanyak 264 juta jiwa. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka pengguna internet tersebut meningkat 10,2% atau 27,9 juta orang. Faktor yang menyebabkan kenaikan ini dikarenakan adanya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah yang tersedia fiber optic dan infrastruktur pendukung lainnya yang menopang aktifitas dengan kuota anggota sekitar 540 APJII. Jawa menjadi salah satu pulau yang memberikan kontribusi terbesar atas penetrasi internet di Indonesia yaitu 55% dari total keseluruhan populasi. Usia pengguna internet mayoritas di Indonesia yaitu dengan rentang 15-19 tahun, disusul dengan usia 20 - 24 tahun, 25 - 29 tahun dan 30 - 34 tahun dan usia paling minoritas adalah pengguna dengan usia 5 - 9 tahun dan 65 tahun ke atas.

Kebutuhan akan internet ini semakin dikuatkan dengan masyarakat yang marak menggunakan ponsel pintar. Ponsel pintar sebagai perangkat yang paling murah dalam mengakses internet. Laporan yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tentang pengguna internet yang mengakses melalui ponsel pintar berkontribusi sebesar 93,9 persen pengguna internet diikuti oleh pengguna tablet dengan 85,2 persen dan komputer sebesar 55,6 persen. Penggunaan media baru seperti internet ini mempunyai daya yang sangat tinggi dan sangat berpengaruh pada dinamika perpolitikan Indonesia. Terbukti dengan dijadikannya media sosial sebagai sebuah alat dalam kontestasi antar kekuatan politik yang ingin mencapai kekuasaan sebagai tujuannya. Media baru ini juga menimbulkan munculnya demokrasi digital atau *cyberdemocracy* yang menjadi perhatian khusus bagi para akademika dan politisi dengan lingkungan seputar politik. Sehingga dalam hal ini media sosial dijadikan sebagai sarana ruang publik dalam berdiskusi berbagai hal termasuk didalamnya mengenai politik.

Pada masa kampanye 2019 juga tidak terlepas dari media sosial sebagai wadah untuk mendapatkan dukungan dengan aktivitas mendapatkan suara. Berbagai media sosial sudah digunakan oleh calon presiden dan wakil presiden untuk mendapatkan simpatisan dari masyarakat. Prabowo-Sandiaga dan Jokowi-Ma'ruf Amin juga mendukung konstituen melalui aktivitas kampanye di media sosial seperti okezone.com, detik.com, dan sejumlah media sosial lain yang terintegrasi dengan surat kabar cetak seperti kompas.com, republik.com, tempo.com, mediaindonesia.com, merdeka.com dan masih banyak lagi. Keikutsertaan proses pilpres 2019 di media sosial ini membuat semakin menambah situasi kontestasi dalam kampanye untuk mencari sebuah dukungan dalam pemilihan umum. Hal ini bukan hanya terjadi pada saat pemilihan calon presiden tetapi juga ketika momen-momen politik di daerah seperti pilkada walikota, bupati atau pemilihan kepala desa. Dengan tidak menggunakan media baru sebagai momen dalam kontestasi politik merupakan sebuah keniscayaan seiring dengan perkembangan yang sangat pesat dari media baru. Sehingga dengan situasi seperti ini maka muncullah yang disebut dengan *Cyberdemocracy*, yang mana praktik dari politik demokrasi ini akan mengarah pada mediatisasi. Demokrasi saat ini bukan hanya berada pada masyarakat offline tetapi juga sudah menyebar di masyarakat online yang terwadahi dengan media online. Media online saat ini menjadi teknologi yang kuat untuk digunakan sebagai instrumen politik efektif, terutama untuk menggali dukungan massa secara efektif, apalagi di tengah wabah covid-19.

Pada fenomena *Cyberdemocracy* ini memiliki efek ganda yakni sisi positif dan sisi negatif. Satu sisi dapat mendorong terjadinya good governance dengan beberapa prinsip yang akan dijalankan, seperti akuntabilitas, partisipasi publik dan transparansi, karena dengan adanya *Cyberdemocracy* sudah membuka peluang kepada publik untuk memberikan pendapatnya dan mengambil keputusan tentang kebijakan publik dan hal ini akan berdampak baik karena memperkuat kualitas dari demokrasi Indonesia. Di sisi negatifnya maka *Cyberdemocracy* membuat sebuah masalah dengan adanya kampanye negatif yang biasa digunakan di media sosial dan online yang mengutamakan berita negatif dari pasangan calon, yang mana hal ini akan berakibat pada antusiasme pemilih pada masa kampanye.

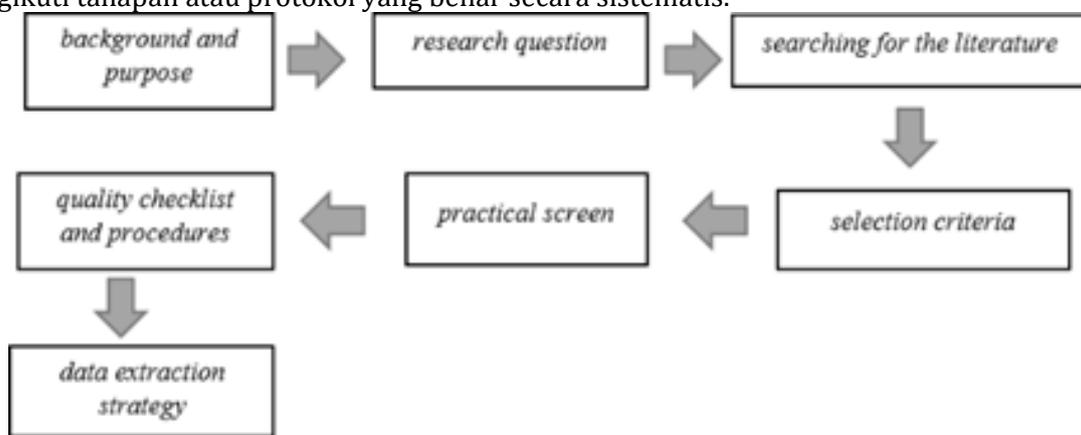
Penelitian sebelumnya mengungkap pada tataran demokrasi virtual dan perang siber di media sosial dalam perspektif netizen Indonesia Indonesia saja dan tidak melihat adanya *cyberdemocracy* pada aktivitas pemilihan umum. Penelitian sebelumnya masih banyak yang membahas pada ranah *cyberdemocracy* di kampanye hitam dan kampanye gelap, namun belum ada penelitian yang menghubungkan dengan angka partisipasi pemilih pada tahun 2019. Adapun

penelitian yang membahas mengenai pemilu 2019 masih menjelaskan pada tataran peluang dan tantangan dalam prespektif politik, sehingga diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan dalam perkembangan cyberdemocracy untuk mengkontrol jumlah partisipasi dalam pemilihan umum.

Peneliti memandang untuk dapat mengetahui dampak dari adanya *Cyberdemocracy* yang muncul di dunia maya terhadap angka partisipasi pemilihan umum, maka kita perlu memahami perkembangan dari *Cyberdemocracy* tersebut. Bagaimana Dinamika *Cyberdemocracy* pada 2019? Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya *Cyberdemocracy* pada pilpres 2019? Dampak Partisipasi Pemilih dengan adanya *cyberdemocracy* di Pilpres 2019? artikel ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana sebuah *cyberdemocracy* dapat memberikan dampak terhadap angka partisipasi pemilih.

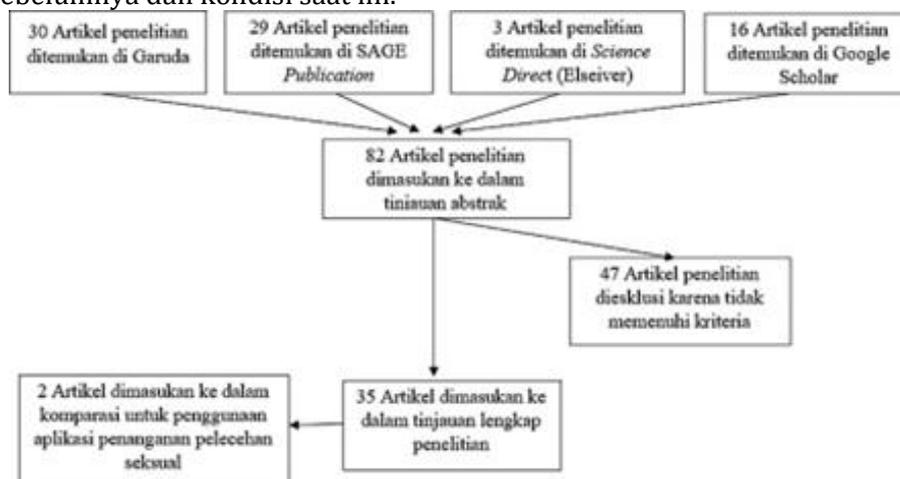
2. Metode

Penelitian ini menggunakan tinjauan sistematis (Systematic Review) dengan menggunakan metode PRISMA (Preferred Reporting tems for Systematic Reviews and Meta-analyses) dengan mengikuti tahapan atau protokol yang benar secara sistematis.



Gambar 1. Prosedur dari systematic review

Pencarian artikel dari jurnal nasional dan internasional merujuk kepada tiga jurnal publikasi. Artikel yang relevan digunakan untuk mengisi topik penelitian ini dengan menggunakan kata kunci *Cyberdemocracy*, media digital, demokrasi digital, pemilihan presiden 2019, partisipasi, pemilih muda. Hasil penelitian dari berbagai artikel kemudian dielaborasi ke dalam pembahasan narrative review. Selanjutnya didiskusikan untuk mengisi kekosongan penelitian sebelumnya dan kondisi saat ini.



Gambar 2. Diagram Alur Pemilihan Artikel

**3. Hasil dan Pembahasan
Dinamika *Cyberdemocracy* pada 2019**

Cyberdemocracy apabila dilihat dari kolaborasi antara dunia maya dan dunia demokrasi maka akan menghasilkan sebuah forum yang membangun keputusan bersama dalam pertukaran informasi yang bebas serta memudahkan sebuah masyarakat untuk mengakses informasi. Demokrasi siber atau biasa dikenal dengan *Cyberdemocracy* mempunyai sebuah media sosial dan teknologi dalam menjangkau partisipasi demokrasi. *Cyberdemocracy* merupakan sebuah konsep yang dihadirkan dengan penuh optimis setelah adanya media sosial. Asal muasal dari konsep ini disebutkan dengan hadirnya "electronic democracy" yang pada tahun 1970 Robert Paul Wolf sudah menekankan bahwa tantangan dalam demokrasi langsung dapat ditangani dengan demokrasi elektronik, yang mana mesin ini nantinya akan memungut suara yang dibentuk secara elektronik melalui rumah dan dipasang pada televisi.

Laporan yang diterbitkan oleh Wearesocial tahun 2018 menjabarkan pengguna internet Indonesia yang masuk pada peringkat empat dalam akses internet saat ini sudah mencapai angka 132 juta orang, dengan 60% pengguna mengakses internet dengan ponsel pintar. Komentar positif dan negatif selalu dituai saat pemilu berlangsung atau diadakan. Salah satu contoh yang dapat diambil yakni adanya tagar #2019GantiPresiden dengan jumlah mencapai 1.189.714 dan tagar #2019TetapJokowi sebanyak 345.849 postingan.

Salah satu media sosial yakni twitter menjadi perangkat komunikasi yang digunakan untuk mendukung popularitas seseorang di dunia maya, sehingga media sosial dapat dijadikan media kampanye bagi calon presiden untuk menyampaikan visi misi dan membangun citra yang bagus kepada calon pemilih dan pendukungnya. Berbagai slogan dan kebijakan dibangun pada masa menjelang kampanye di media sosial untuk mengguncang popularitas dan memberikan sebuah opini terkait lawan politik.

Komentar positif dan negatif selalu dituai saat pemilu berlangsung atau diadakan. Fenomena pemilihan presiden 2019 ini menimbulkan banyak sekali kegaduhan, tidak terlepas di media massa dan media sosial. Emosi masyarakat dibuat sebagai objek yang menimbulkan keprihatinan dan pada akhirnya berurusan dengan hukum. Salah satu penyebab dari kegaduhan adanya berita bohong (hoax) yang terdata pada tahun-tahun kampanye sebanyak 53 kasus dan 324 hate speech (ujaran kebencian) yang sudah diselesaikan secara hukum. Isu mengenai politisasi agama tidak kalah menonjol dibandingkan dengan persoalan hoaks dan ujaran kebencian pada pilpres 2019. Menariknya pada kedua belah pihak menganggap paling mewakili suara masyarakat. Digunakannya politisasi agama dan character assassination memperuncing ketegangan sosial dan menimbulkan rasa saling tidak percaya dan saling tidak menghargai antarsesama anak calon pasangan dan anak bangsa. Demokrasi yang saat ini terbangun adalah demokrasi yang tidak mementingkan adanya nilai-nilai budaya positif seperti saling mempercayai, saling menghormati, tolong menolong dan gotong royong.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 45 A ayat 2 yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Namun dalam pelaksanaannya banyak sekali beberapa oknum menyalahgunakan kegiatan kampanye ini dengan menyebar fitnah, hoax bagi kubu yang menjadi lawannya maka timbulah sebuah istilah "Kampanye Hitam"/ "Black Campaign". Kegiatan ini memberikan dampak buruk pada pendidikan politik masyarakat yang seharusnya dilaksanakan secara bersih, nyatanya kampanye hitam memberikan pengajaran untuk mendapatkan sesuatu dengan cara apapun sekalipun menggunakan cara yang salah.

Maraknya kampanye Negative (Negative Campaign) dan Kampanye Hitam (Black Campaign) tidak bisa dicegah ketika masa-masa seperti jelang pemilihan umum di Indonesia. Dengan hadirnya kampanye hitam mencerminkan bobroknya moralitas bangsa Indonesia. Kejadian ini disertai dengan isu SARA dalam pemilihan presiden 2019 yang lalu, maka dari itu peran dari masyarakat sangat dibutuhkan. Satu suara dari salah satu masyarakat Indonesia akan sangat memberikan peran untuk kedepannya. Sebagai masyarakat harus sangat pintar dalam mencerna seluruh informasi yang beredar dikalangan luas, data atau fakta yang didapatkan haruslah valid jangan sampai terpengaruh apalagi terprovokasi. Nilai-nilai demokrasi akan

menunjukkan kepada kita bahwa perbedaan salah satu kekayaan dari negara Indonesia dan jangan dibuat sebagai sumber bencana, awal perpecahan atau sebab-sebab permusuhan, tetapi perbedaan dapat dijadikan sebagai kekuatan bangsa untuk lebih tahu diri dan saling menghormati.

Agresi kepentingan rakyat dan fungsi artikel membuka ruang kebebasan membuat politisi bukan satu-satunya aktor dalam perpolitikan, di dalam fungsi artikulatif terdapat banyak sekali lembaga-lembaga baru yang muncul sebagai pengawas extra parlementer setelah era reformasi. Dalam proses ini maka di media-media baik cetak maupun elektronik semakin bebas dan berani dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah dengan adanya liberalisasi politik CSO. Politisi dan partai politik dihadapkan pada tantangan baru dengan maraknya kompetitor yang terlibat dalam isu-isu pemerintahan yang didampingi juga oleh lembaga-lembaga pengawas extra parlementer.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Cyberdemocracy pada pilpres 2019

Cyberdemocracy yang sedang dihadapi pilpres 2019, sangat penting bagi banyak peneliti dan pembuat kebijakan lebih memahami konteks ini. Partisipasi publik sebagai tujuan dari media yang dituangkan semasa kampanye. Lalu dari partisipasi tersebut kami akan menilik tingkat partisipasi. Para calon presiden dan partisipan rakyat sebagai calon pemilih dapat menggunakan komunikasi langsung seperti Televisi, Radio dan media sosial atau media-media lainnya. Sebagai contohnya Prabowo sebagai calon presiden pada saat itu membuat sebuah keterpanggilan nurani dalam hal membela rakyat sebagai jihad kehidupannya karena setelah bela negara dia akan siap jika Tuhan memanggilmnya seperti ungkapan “lebih baik saya hancur daripada rakyat menderita” dan “saya harusnya istirahat, tapi rakyat masih miskin”.

Timeses pilpres menyatakan setuju dan mendukung pernyataan ini dengan status yang dibuat di media sosial sebagai sebuah pernyataan bagi media langsung. Dalam membuat mewujudkan demokrasi kesatuan Indonesia maka pelaksanaan pemilihan umum presiden tahun 2019 menjadi sebuah memontum yang sangat penting Indonesia. Penyampaian pesan ketika kampanye akan sangat dimanfaatkan oleh para kandidat dan tim sukses pada pemilihan presiden 2019. Sekitar 40% atau 90 juta orang saat ini menjadi pemilih pemula atau generasi milenial mengingat Indonesia sedang berada pada bonus demografi, kekuatan sosial media mulai saat ini tidak bisa diremehkan untuk sebuah elektabilitas kedua pasang calon hal ni disampaikan oleh Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangsi Syarwi Chaniago. Dalam hal ini pemilihan presiden dan wakil presiden diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 48 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pada pasal 2 menyebutkan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Menurut Bashori salah satu hak pasangan calon yang dilindungi oleh undang-undang ialah kampanye.

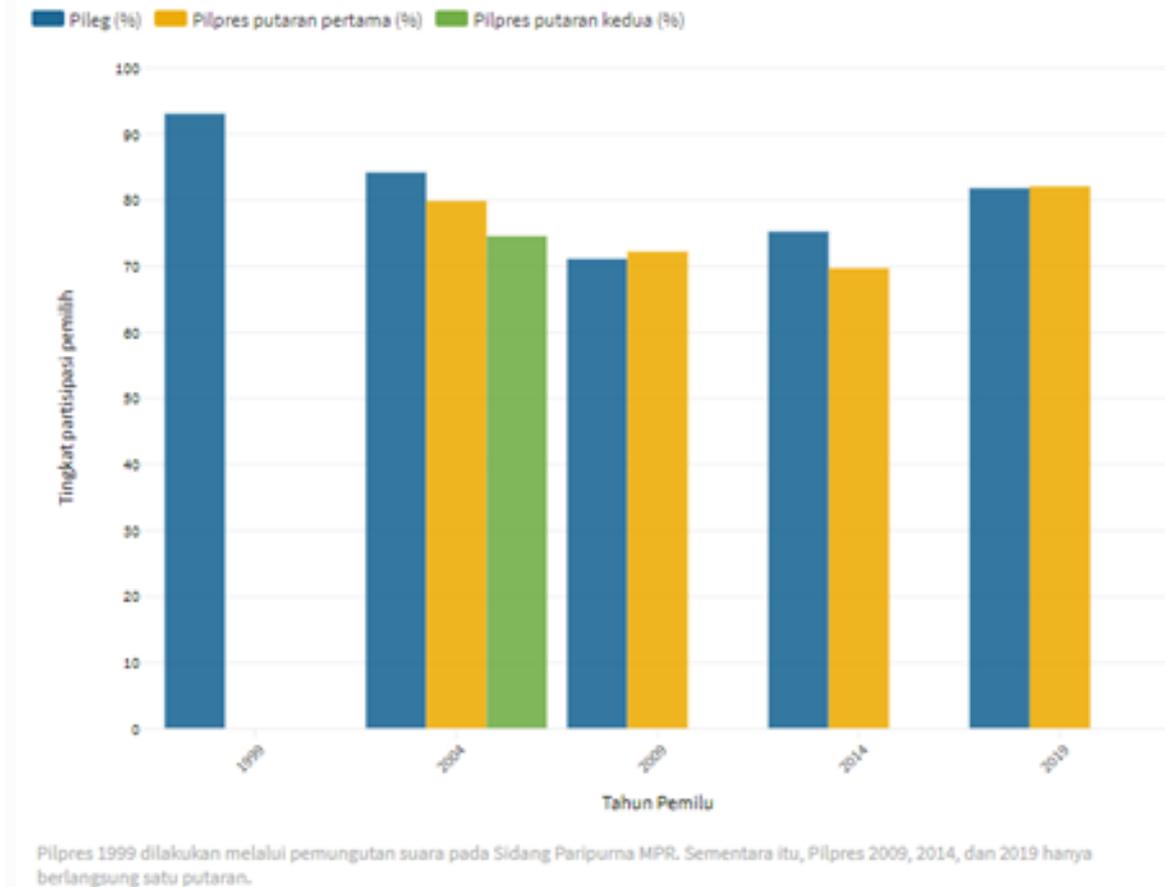
Pada tahun politik ini, sebagai salah satu bentuk persyaratan dari prosedur demokrasi, meskipun dalam hal ini demokrasi dapat disamakan dengan pemilihan umum, namun salah satu objek demokrasi yang sangat penting adalah pemilihan umum. Negara demokratis yang baik dapat diwujudkan dengan pemilu. Pengimplementasian nilai-nilai luhur dalam ajang pemilu harus diterapkan para elite peserta pemilu mendorong simpatisannya menjunjung nilai-nilai tersebut. Pemilu akan membuat bangsa Indonesia mendekati cita-cita bangsa yang berkeadilan dan jujur. *Everyone has a personal set of ethical values and the vast majority of public officials have positive ethics.*

Dampak Partisipasi Pemilih dengan adanya Cyberdemocracy di Pilpres 2019

Partisipasi Pemilih Media sosial yang memiliki ciri khas dalam memberikan sebuah dampak dalam partisipasi dan membuka peluang ruang demokrasi untuk berkomunikasi dengan bebas serta mengambil keputusan bersama. Jantung dari demokrasi adalah partisipasi dengan terbentuknya suara dari berbagai pihak. Proses dari keterlibatan yang aktif dari warga negara akan membuah sebuah kebijakan pemerintahan yang pastinya berpengaruh pada aspek kehidupan. Salah satu hal yang paling sederhana dari wujud partisipasi politik ialah perumusan

dan pelaksanaan kebijakan publik. Pada sebuah niat yang setidaknya terdapat kontribusi dalam kebijakan publik akan menunjukkan persyaratan di dalam partisipasi politik.

Teori etik yang disampaikan oleh filsuf Jerman, Manuel Kant mengingatkan pada Indonesia yang mempunyai multikultural beragam, jika hal ini tidak diwadahi secara baik maka akan menimbulkan konflik. Konflik dapat terjadi jika suatu masyarakat menganggap bahwa kelompoknya paling benar dalam hal agama, noralitas dan kultur. Indonesia perlu banyak belajar mengenai upaya preventif yang biasa dilakukan dan juga upaya solutif dalam mencegah sebuah konflik, karena Indonesia mempunyai subbudaya etnik dan daerah yang sangat majemuk.



Gambar 3. Tingkat Partisipasi Pemilih
Sumber: kpu.go.id

Pada gambar tersebut menunjukkan tingkat partisipasi pemilih yang meningkat pada tahun 2019. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tingkat partisipasi yang meningkat membuat penjelasan bahwa dengan adanya demokrasi siber/*cyberdemocracy* membuat masyarakat Indonesia sebagai pemilih atau partisipan pemilu, meningkat meskipun grafik peningkatannya tidak cukup signifikan, hal-hal seperti kampanye negatif atau kampanye hitam tidak membuat partisipan memilih untuk masuk pada golongan putih. Sekalipun dengan adanya *cyberdemocracy* memberikan dua dampak bagai sisi mata logam, yakni dampak buruk dan dampak negatif.

Perihal pemilihan presiden 2019 maka tampak bahwa masih ada oknum yang belum paham mengenai nilai-nilai budaya sendiri dan ketahanan bangsa sebagai empat pilar

kebangsaan Indonesia (yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika) yang diserap dari falsafah dan sejarah hidup bangsa. Gambaran ini membuat pilpres 2019 lalu mengalami pembelahan sosial yang cukup tajam di masyarakat. Hal ini terbukti dengan penggunaan istilah cebong dan kampret, “cebong” sebagai julukan pendukung Jokowi sedangkan “kampret” sebagai julukan pendukung Prabowo, sebutan tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Demikian juga dengan penggunaan politisasi dentitas (SARA). Nilai-nilai seperti saling menghormati/menghargai, saling percaya dan empati adalah nilai yang terdapat di Pancasila serta harus dijunjung sebagai sarana demokrasi rutin lima tahunan, pilpres dan pileg 2019.

Terlepas dari itu semua nyatanya pemilu setelah era reformasi memberikan sebuah dampak positif. Terlihat dari adanya proses era transisi liberasi politik yang membuat proses politik menjadi lebih prular dan kompetitif, yang mana hal ini dapat terlihat dari kontestasi politik yang ada. Indonesia menganut politik kepartaian yang membuat kontestasi bukan hanya persaingan antar partai politik saja melainkan juga kontestasi perpolitikan antar aktor politik yang semakin tajam. Kontestasi yang terjadi sedikit menuai kritikan yang ditujukan pada kompetisi internal politik yang masih menganut asas oligarki, persaingan perebutan jabatan juga semakin giat dilakukan di dalam partai atau pada proses rekrutmen anggota legislatif. Situasi yang semakin kompetitif membuat terbukanya kerangka regulasi nasional yang mendesain tentang pemilihan umum mengarah pada pemurnian sistem proporsional terbuka, di mana politisi yang terpilih dapat berhasil menuai suara terbanyak dan bisa duduk di parlemen, dia adalah politisi yang berhasil dalam pemilihan umum saat itu.

4. Simpulan

Pemilu 2019 memberikan dampak yang sangat besar bagi Indonesia, perpecahan antar kelompok menjadi tidak terelakan, terutama semakin melesatnya kemajuan teknologi. Penanganan kasus ditengah perkembangan teknologi yang maju harus mampu menyesuaikan kebutuhan dan peluang keberhasilan yang nyata. Masalah pemilu digabungkan dengan kemajuan teknologi menghasilkan sebuah dampak bagi para partisipan atau pemilih. Penelitian ini memberi sumbangsih yang nyata kepada pemerintah khususnya pada dunia pendidikan dan telekomunikasi, selain itu penelitian ni memberikan ruang kepada masyarakat atau komunitas untuk selalu melakukan kerjasama dan komunikasi dalam hal mengetahui dampak dari adanya *Cyberdemocracy*.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada para dosen di Program Pasca Sarjana Departemen Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia untuk pengalaman belajar bersama sehingga bisa menuliskan artikel ini. Kepada Prof. Karim Suryadi sebagai Pembimbing Akademik, Dr. Sandey Tantra Paramitha, S.Si., M.Pd dan Dr. Leni Anggraeni, M.Pd. yang telah banyak berkontribusi serta pihak lain yang turut berperan aktif dalam proses pembuatan artikel ini yang tidak bisa disebutkan oleh penulis satu persatu.

Rekomendasi

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya agar mampu melaksanakan penelitian dengan cara perolehan data secara primer, sehingga mampu melihat dampak langsung adanya *Cyberdemocracy* terhadap minat atau partisipasi masyarakat.

Daftar Rujukan

- Jayani, D.H. (2019). *Survei APJII: 49% Pengguna Internet Pernah Dirisak di Medsos*. Databoks.
- Bashori, Khoiruddin. “Pendidikan Politik Di Era Disrupsi.” *Sukma: Jurnal Pendidikan* 2, no. 2 (2018): 287–310.
- Carver, S., A. Evans, R. Kingston, and I. Turton. “Public Participation, GIS, and Cyberdemocracy: Evaluating on-Line Spatial Decision Support Systems.” *Environment and Planning B: Planning and Design* 28, no. 6 (2001).

Gatara, Asep A. Sahid. "Demokrasi Nithing Kritik Terhadap Konsep Dan Praktek Cyberdemocracy." *Demokrasi Digital* 22, no. October (2016).

Hasyim, Bin, Nurbudiwati Sartibi, and Hasbi Shiddiq Fauzan. "Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Dalam Partisipasi Pelaksanaan Pemilihan Umum." *Budaya dan Masyarakat* 1, no. 1 (2020): 1-6. www.lanmas.fisip.uniga.ac.id.

Irawan, Aditya Wicaksono, Aan Yusufianto, Dwi Agustina, and Reagan Dean. *Laporan Survei Internet APJII. Laporan Survei Internet APJII, 2020.*

Kemertrian Komunikasi dan Informasi. "Kominfo : Pengguna Internet Di Indonesia 63 Juta Orang." *Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI* (2013).

Latif, Adam, Muhammad Rusdi, Ahmad Mustanir, and Muh Sutrisno. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang." *Jurnal MODERAT* 5, no. 1 (2019).

Poster, Mark. (2020). "Cyberdemocracy." In *Internet Culture*.

Solihah, Ratnia. "Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1.

Syahputra, Iswandi. (2018). "Demokrasi Virtual dan Perang Siber di Media Sosial: Perspektif Netizen Indonesia." *Jurnal ASPIKOM* 3, no. 3 (2017).

Triono. (2017). "Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019." *Jurnal Wacana Politik* 2, no. 2.

Zuhro, R Siti. (2013). *Demokrasi Dan Pemilu Presiden 2019.* *Jurnal Penelitian Politik* 16, no. 1 (2019). "Aspek Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Raya Online Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Semarang tahun 2011." *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture* 2, no. 2.